



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANDURO**

Jalan Raya Ngoro KM 14 Desa Manduro MG, Ngoro Mojokerto
Kode Pos 61385 Jawa Timur Telp. (0321) 681917
Email : manduropuskesmas@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANDURO

NOMOR : 188.4 /C.VII.SK/ 01 / 416 - 102.19 / 2023

TENTANG

**PELAYANAN KLINIS UPTD PUSKESMAS MANDURO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS MANDURO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah;
 - b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pelayanan Klinis Di UPTD Puskesmas Manduro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 tambahan lembaran Negara Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Perubahan Atas Permenkes RI Nomor 46 tahun 2016 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indosesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten atau Kota;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
25. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 21 April 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap Dan Puskesmas Pembantu;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Mojokerto ;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 tahun 2017 Tentang Pemberian tanda merah pada buku kesehatan ibu dan Anak terhadap ibu hamil resiko tinggi
30. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/661/HK/416-012/2015 Tetang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat MANDURO;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MANDURO TENTANG PELAYANAN KLINIS DI UPTD PUSKESMAS MANDURO;
- Kesatu : Menetapkan bahwa UPTD Puskesmas MANDURO tentang pelayanan klinis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : di Manduro

Pada Tanggal : 15 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANDURO,



dr. SISKAWIDIYANTI

Penata Tk. I

NIP. 19830825 2014 12 2 001